

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA
KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
(STUDI PUTUSAN NO.69/PID.SUS-TPK/2023/PN MDN)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana (S1) Pada Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu



OLEH :

**ROYAL GULTOM
NPM. 2102100059**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
PENGADAAN BARANG DAN JASA DI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA (STUDI PUTUSAN
NO.69/PID.SUS-TPK/2023/PN MDN)

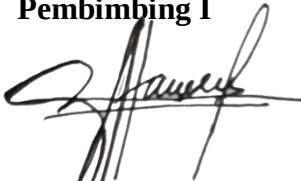
NAMA : ROYAL GULTOM

NPM : 2102100059

PROGRAM STUDI : HUKUM

Disetujui Pada Tanggal : Juli 2025

Pembimbing I



Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.Hi., M.H
NIDN. 0114038801

Pembimbing II



Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H
NIDN. 0116088902

Rantauprapat, Juli 2025

**Dekan
Fakultas Hukum**



Risdalina, S.H., M.H
NUPTK 6938742643230112

**Ketua Program Studi
Ilmu Hukum**



Indra Kumala Sari M, S.H., M.H
NUPTK 6857765666131082

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
PENGADAAN BARANG DAN JASA DI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA (STUDI PUTUSAN
NO.69/PID.SUS-TPK/2023/PN MDN)

NAMA : ROYAL GULTOM

NPM : 2102100059

PROGRAM STUDI : HUKUM

Telah Di Uji Dan Dinayatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal ... Juli 2025

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : Dr.Muhammad Yusuf Siregar, S.Hi., M.H
NIDN : 0114038801

Tanda Tangan

.....

Penguji II (Anggota)

Nama : Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.
NIDN : 0116088902

.....

Penguji III (Anggota)

Nama : Risdalina, SH., MH
NIDN : 0106066401

.....

Rantauprapat, Juli 2025

Dekan
Fakultas Hukum



Risdalina, S.H., M.H
NUPTK 6938742643230112

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Indra Kumala Sari M, S.H., M.H
NUPTK 6857765666131082

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
PENGADAAN BARANG DAN JASA DI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA (STUDI PUTUSAN
NO.69/PID.SUS-TPK/2023/PN MDN)**

NAMA : ROYAL GULTOM

NPM : 2102100059

PROGRAM STUDI : HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebahagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia Pencabutan Gelar Akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Rantauprapat, Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan



ROYAL GULTOM
NPM. 2102100059

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Studi Putusan No. 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn)”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa serta menganalisis faktor-faktor yang berkaitan dengan penanganan perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa MJ dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp100.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Putusan tersebut menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertimbangan hakim antara lain berkaitan dengan peran terdakwa yang bukan sebagai pelaku utama dan keadaan bahwa terdakwa tidak menikmati seluruh keuntungan tindak pidana. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pertimbangan hukum yang jelas, logis, sistematis, dan bersifat kasuistik dalam menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa, Putusan Hakim, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

This research is entitled “Legal Analysis of the Judge’s Decision on the Criminal Act of Corruption in the Procurement of Goods and Services at the Education Office of North Labuhanbatu Regency (Study of Decision No. 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn)”.

This study aims to analyze the legal basis and judicial considerations in imposing a sentence for corruption in the procurement of goods and services and to examine factors related to the handling of the case. The research employs a normative juridical method using a statutory approach and a case approach. The research data were obtained through library research using primary, secondary, and tertiary legal materials, which were analyzed descriptively through deductive and inductive approaches. The results show that the defendant, MJ, was legally and convincingly proven guilty of committing corruption jointly as stipulated under Article 3 paragraph (1) in conjunction with Article 18 paragraph (1) letter b of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) number 1 of the Indonesian Criminal Code. The panel of judges imposed a sentence of 2 years and 6 months imprisonment and a fine of IDR 100,000,000, with a provision that if the fine was not paid, it would be replaced by 1 month of imprisonment. The decision imposed a sentence below the specific minimum penalty stipulated in Article 3 of the Anti-Corruption Law. The judicial considerations included the defendant’s role as not being the main perpetrator and the fact that the defendant did not fully benefit from the proceeds of the criminal act. This study demonstrates the importance of clear, logical, systematic, and case-specific judicial reasoning when imposing a sentence below the statutory specific minimum penalty.

Keywords: Corruption Crime, Procurement of Goods and Services, Judge’s Decision, Judicial Consideration.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat, karunia dan limpahan rahmat-Nya yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Studi Putusan No.69/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mdn,” yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian pendidikan Strata satu , Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Dalam penyusunan skripsi ini berbagai hambatan dan keterbatasan dihadapi oleh penulis mulai dari tahap persiapan sampai dengan penyelesaian tulisan, namun berkat bantuan bimbingan dan kerja sama berbagai pihak, hambatan dan kesulitan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H, M.H., selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Assoc.Prof.Ade Parlaungan Nasution, Ph.D, selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Bapak Jayanta Amd.IP, S.H, M.H, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas
4. II A Rantauprapat yang telah membuka peluang dan MOU kepada Pihak Universitas Labuhanbatu dalam membuka Kelas Belajar di LAPAS.
5. Bapak Khairul Bahri Siregar, Amd.IP,S.H, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat yang telah mendukung dan

memberikan Fasilitas kepada Mahasiswa (Pegawai) dalam proses Belajar Mengajar di Aula Lapas.

6. Ibu Risdalina, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
7. Bapak Indra Kumala Sari Munthe, S.H, M.H., selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
8. Bapak Dr.Muhammad Yusuf Siregar, S.Hi, M.H., selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing serta memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Wahyu Simon Tampubolon, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing serta memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Orang tua serta Mertua Penulis yang tak pernah lupa mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam berjuang menyelesaikan penelitian ini sampai menyelesaikan Pendidikan Strata Satu Ilmu Hukum di Universitas Labuhanbatu.
11. Istri Tercinta Ulita Situmorang S.E yang selalu disamping Penulis juga memberikan semangat dan doa dalam penyelesaian Pendidikan Ilmu Hukum Strata Satu di Universitas Labuhanbatu terkhusus dalam penyelesaian Skripsi ini.
12. Bapak dan Ibu Dosen beserta pegawai dan Staff Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang selalu ikut dalam membantu dan

membimbing kami dalam Pendidikan di Universitas Labuhanbatu.

13. Rekan-rekan mahasiswa Tingkat akhir, sahabat yang telah memberikan bantuannya, baik moril maupun materi yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu dalam Skripsi ini.

Skripsi ini merupakan karya terbaik dapat penulis persembahkan, Namun penulis menyadari bahwa didalamnya masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat menjadikan penelitian ini menjadi lebih baik lagi.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Rantauprapat, Juli 2025
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Royal Gultom', with a stylized, flowing script.

ROYAL GULTOM

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Pengertian Hakim	12
2.1.1 Pengertian Kekuasaan Hakim dan Kewajiban Hakim.....	16
2.2 Peranan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	19
2.3 Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim Dasar	22
2.4 Macam-Macam Pertimbangan Hakim	27
2.5 Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa.....	29
2.5.1 Berlakunya Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012	32
2.5.2 Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	34
2.5.3 Jenis-jenis Pengadaan Barang dan Jasa.....	39
2.5.4 Etika Pengadaan Barang dan Jasa	40
2.5.5 Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang.....	41
2.5.6 Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa	42
2.6 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	43
2.6.1 Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi	51
2.6.2 Perbuatan Pidana	53

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	54
3.1 Jenis Penelitian	54
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	54
3.3 Jenis dan Sumber Data	56
3.4 Cara Kerja.....	57
3.5 Teknik Pengumpulan Data	57
3.6 Analisis Data.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
4.1 Pengaturan Hukum Tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa.....	58
4.1.1 Perbuatan-Perbuatan Yang Dilarang Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Beserta Dengan Sanksinya	58
4.1.2 Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi Dalam Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	62
4.1.3 Bentuk-Bentuk Penyimpangan Dalam Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi	65
4.2 Analisis Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Putusan Perkara Nomor: NO.69/PID.SUS-TPK/2023/PN MDN	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79